

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akumulasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, baik yang berasal dari faktor internal wajib pajak maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan perpajakan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan guna mengurangi jumlah piutang serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Internal yang Memengaruhi Akumulasi Piutang PBB-P2

Faktor internal yang memengaruhi terjadinya akumulasi piutang PBB-P2 di Kota Madiun berkaitan dengan karakteristik, kondisi, dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor tersebut meliputi masih rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, keterbatasan kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan pembayaran, kebiasaan menunda pembayaran hingga mendekati atau melewati jatuh tempo, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai manfaat PBB-P2 dan sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran.

Meskipun secara umum tingkat kesadaran wajib pajak menunjukkan perkembangan yang positif, yang tercermin dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang mampu mencapai target setiap tahun, masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum menempatkan pembayaran pajak sebagai kewajiban yang perlu diprioritaskan. Kondisi tersebut menyebabkan tunggakan pajak terus muncul dari tahun ke tahun dan pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya akumulasi piutang PBB-P2.

2. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Akumulasi Piutang PBB-P2

Faktor eksternal yang memengaruhi akumulasi piutang PBB-P2 berkaitan dengan aspek administrasi dan pengelolaan perpajakan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Faktor-faktor tersebut meliputi belum optimalnya pemutakhiran data objek dan subjek pajak, perubahan kepemilikan objek pajak yang belum segera ditindaklanjuti melalui proses mutasi data, ketidaksesuaian alamat wajib pajak, distribusi SPPT yang belum sepenuhnya efektif, sistem penagihan yang masih lebih berorientasi pada pencapaian target penerimaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam kegiatan pengelolaan dan penagihan piutang.

Berbagai kendala tersebut menyebabkan penyampaian informasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan belum berjalan secara optimal sehingga sebagian piutang sulit ditagih dan terus berkembang menjadi tunggakan jangka panjang. Tingginya proporsi piutang dengan umur tunggakan lebih dari dua tahun menunjukkan bahwa permasalahan

administrasi perpajakan dan efektivitas pengelolaan piutang masih menjadi tantangan utama dalam upaya pengendalian piutang PBB-P2 di Kota Madiun.

B. Implikasi

Tingginya akumulasi piutang PBB-P2 di Kota Madiun menunjukkan bahwa sebagian potensi penerimaan daerah belum dapat direalisasikan secara optimal menjadi pendapatan yang masuk ke kas daerah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, dominasi piutang dengan umur tunggakan lebih dari dua tahun mengindikasikan tingginya risiko piutang macet yang dapat memengaruhi kualitas aset yang dimiliki pemerintah daerah. Akumulasi piutang yang terus meningkat juga dapat menimbulkan kesenjangan antara potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut dengan penerimaan yang benar-benar terealisasi, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya pengendalian piutang tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga perlu diarahkan pada penanganan berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya tunggakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala, serta penguatan sistem administrasi dan mekanisme penagihan merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi akumulasi piutang di masa mendatang. Apabila berbagai faktor tersebut dapat dikelola

dengan lebih baik, maka potensi penerimaan PBB-P2 dapat lebih dioptimalkan, kualitas pengelolaan piutang dapat ditingkatkan, dan stabilitas penerimaan daerah dapat terjaga guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

C. Keterbatasan

Penelitian pada akumulasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya:

1. Keterbatasan Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor internal yang berasal dari wajib pajak serta faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Terdapat berbagai faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi akumulasi piutang PBB-P2 yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain perubahan kebijakan atau regulasi perpajakan, perkembangan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, serta kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab akumulasi piutang PBB-P2.

2. Keterbatasan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi dan karakteristik pengelolaan piutang PBB-P2 di wilayah tersebut. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini belum tentu dapat diterapkan atau digeneralisasikan secara langsung pada daerah lain yang memiliki karakteristik wajib pajak, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta sistem administrasi dan pengelolaan perpajakan yang berbeda. Perbedaan kondisi tersebut dapat memengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan akumulasi piutang maupun efektivitas strategi pengelolaannya, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut apabila hasil penelitian ini akan diterapkan pada daerah lain.

3. Keterbatasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya akumulasi piutang PBB-P2. Namun, metode yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh masing-masing faktor terhadap akumulasi piutang yang terjadi. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih berfokus pada identifikasi dan pemahaman faktor-faktor penyebab piutang daripada mengukur hubungan atau tingkat pengaruhnya secara statistik.

D. Saran

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kota Madiun, beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun disarankan untuk melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara lebih rutin dan berkelanjutan guna mengurangi ketidaksesuaian data yang berpotensi menghambat proses penagihan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan strategi penagihan, terutama terhadap piutang yang telah masuk dalam kategori kurang lancar dan piutang macet. Upaya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 dapat terus meningkat.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya membantu menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung

pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik bagi masyarakat Kota Madiun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik melalui perbandingan antar daerah maupun dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau *mixed methods* agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akumulasi piutang PBB-P2 serta alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan piutang pajak daerah.